



# SOSIALISASI

**DALAM RANGKA RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP BPK RI ATAS LKPD PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018**

**JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PADA BELANJA MODAL**



**BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	<b>Belanja</b>				
20	2.1. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang/Jasa di Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	<p>BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:</p> <p>a. Kepala Bidang Anggaran BPKD dan Kepala Bidang P5H BPAD untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait penganggaran sesuai ketentuan kepada seluruh SKPD; dan</p> <p>b. Kepala BPKD untuk membuat kode akun Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dalam kode rekening Belanja Modal sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemprov DKI Jakarta.</p>	<p>BPKD bersama dengan BPAD akan membuat undangan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi terkait Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan agar dimasukkan dalam Kode Rekening Belanja Modal berkenaan bukan pada Belanja Barang dan Jasa. Dan SKPD secara berjenjang agar memberi arahan kepada UKPD dibawah koordinasinya.</p> <p>Terkait dengan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan agar dimasukkan dalam Kode Rekening Belanja Modal maka BPKD dan BPAD akan mengarahkan kepada SKPD agar dalam mengusulkan komponen Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan melalui sistem e-budgeting memakai Kode Rekening Belanja Modal berkenaan dan tidak menggunakan Kode Rekening Belanja Barang dan Jasa.</p>	<p>Juni 2019</p> <p>Juli 2019</p>	<p>Bersamaan dengan jadwal pengusulan Komponen dan Kode Rekening Belanja dalam rangka Penyusunan RAPBD 2020 dan Rancangan Perubahan APBD 2019 melalui sistem e-budgeting bahwa untuk pengusulan komponen Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sudah menggunakan Kode Rekening Belanja Modal dan tidak menggunakan Kode Rekening Belanja Barang dan Jasa.</p>
28	2.9. Kesalahan Penganggaran Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa pada Delapan SKPD	<p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran BPKD dan Kepala Bidang P5H BPAD untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait penganggaran sesuai ketentuan kepada seluruh SKPD</p>	<p>BPKD bersama dengan BPAD akan membuat undangan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi terkait penganggaran sesuai ketentuan. Selanjutnya SKPD secara berjenjang akan mengarahkan secara kepada UKPD dibawah koordinasinya.</p>	<p>Juni 2019</p>	

SURAT EDARAN TERLAMPIR

**KLIK DISINI**

## USULAN KODE REKENING DAN KOMPONEN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PADA BELANJA MODAL

- DALAM HAL KODE REKENING DAN KOMPONEN YANG DIBUTUHKAN BELUM TERSEDIA DALAM SISTEM E-BUDGETING MAKA SKPD/UKPD DAPAT SEGERA MENGUSULKAN MELALUI ALAMAT WEB <http://apbd.Jakarta.go.id>
- APABILA KOMPONEN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN/PEMBANGUNAN ASET YANG SAAT INI MASIH MENGGUNAKAN KODE REKENING BARANG DAN JASA MAKA SEGERA MENGUSULKAN TAMBAH KODE REKENING BELANJA MODAL YANG BERKENAAN PADA KOMPONEN YANG BERSANGKUTAN.

**CONTOH HASIL INPUT YANG SUDAH SESUAI**

**TERLAMPIR [KLIK DISINI](#)**

**CONTOH HASIL INPUT YANG MASIH PERLU DISESUAIKAN**

**TERLAMPIR [KLIK DISINI](#)**

**CONTOH KOMPONEN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN  
PENGAWASAN PADA BELANJA MODAL YANG MASIH MENGGUNAKAN KODE  
REKENING BARANG DAN JASA**

TERLAMPIR **KLIK DISINI**

Cukup Sekian dan.....

**TERIMA KASIH**